



AKUNTANSI HIJAU BUMDES

Dr. Lisna Lisnawati, S.E., M.Ak.

Dr. Suparjiman, M.M., CHRA., CSRS.



AKUNTANSI HIJAU BUMDES

Dr. Lisna Lisnawati, S.E., M.A.

Dr. Suparjiman, M.M., CHRA., CSRS.

AKUNTANSI HIJAU BUMDES

Penulis:

Dr. Lisna Lisnawati, S.E., M.Ak.
Dr. Suparjiman, M.M., CHRA., CSRS.

Editor : Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : viii, 75
ISBN : 978-634-7021-97-7
Terbit Pada : Desember 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya buku berjudul “Akuntansi Hijau BUMDes” ini akhirnya dapat diselesaikan. Buku ini lahir dari keinginan untuk membantu para pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktiknya, BUMDes memiliki peran besar dalam mendorong perekonomian desa. Namun, di tengah tuntutan pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan usaha desa perlu dilakukan secara lebih bijak terhadap lingkungan. Melalui pendekatan akuntansi hijau (*green accounting*), buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap kegiatan usaha memiliki dampak, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dengan mencatat dan melaporkan dampak tersebut secara transparan, BUMDes dapat membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam desa.

Isi buku ini disusun dengan bahasa yang sederhana dan disertai contoh yang mudah dipahami, agar dapat digunakan langsung oleh pengelola BUMDes, perangkat desa, maupun masyarakat yang tertarik dalam pengembangan usaha berbasis lingkungan. Harapannya, buku ini dapat menjadi panduan praktis dalam menerapkan prinsip keuangan yang berwawasan hijau di tingkat desa.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan masukan selama penyusunan buku ini. Kepala desa dan pengurus BUMDES sebagai subjek yang memberikan inspirasi untuk menerbitkan buku ini. Rekan-rekan sejawat juga LPPM universitas Muhammadiyah Bandung

yang terus memberikan dukungan agar produktif dalam menciptakan ide-ide akademis yang bermanfaat. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi salah satu langkah kecil menuju desa yang mandiri, berdaya saing, dan peduli lingkungan.

Sumedang, 08 November 2025

Penulis

PRAKATA

Buku ini disajikan sebagai perspektif baru dalam mencermati perkembangan akuntansi yang semakin dinamis terhadap keberlanjutan dan lingkungan. Sektor publik sebagai sektor pemerintah tentu harus bergerak cepat menanggapi perubahan yang terjadi.

Dalam level pemerintahan pusat dan daerah perspektif akuntansi lingkungan masih berproses dan diadopsi perlahan. Sementara itu di badan usaha milik negara adopsi akuntansi lingkungan sudah sangat mapan dan penerapannya dilakukan seiring dengan peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51 tahun 2017 terkait *Sustainability Report*. Namun, di sektor badan usaha milik daerah dan desa pembenahan harus terus dilakukan tidak hanya adopsi pendekatan lingkungan tapi juga kepatuhan dalam pelaporan dengan pendekatan akuntansi konvensional.

Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah semua pihak untuk mewujudkan badan usaha milik daerah dan desa yang memiliki tata kelola yang baik. Dengan buku ini pemahaman kita terkait perspektif lingkungan dalam akuntansi akan dibuka. Buku ini juga memberikan pengetahuan baru bagaimana mengaplikasikan teori akuntansi lingkungan dalam badan usaha milik desa yang memiliki bidang usaha yang beragam.

Harapan besar dari penulis buku ini menjadi salah satu role model dalam menyiapkan satu set aturan penyusunan laporan keuangan yang memasukkan lingkungan dalam pengakuan, pengukuran dan pelaporannya.

Ucapan terima kasih bagi semua pihak yang sudah membantu menyelesaikan buku ini terutama bapak Dr. Suparjiman, M.M yang percaya dan meyakini kemampuan saya.

Ucapan lainnya saya sampaikan kepada L2Dikti wilayah iv, Rektor universitas Muhammadiyah Bandung, Ketua dan sekretaris LPPM Universitas Muhammadiyah Bandung, Dekan Universitas Muhammadiyah Bandung dan rekan-rekan sejawat.

Sumedang, 08 November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Implementasi IFRS S1 dan S2	1
B. Kelemahan Akuntansi Konvensional	3
C. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Hijau BUMDES.....	4
D. Pengguna Laporan Keuangan BUMDES.....	5
E. Tujuan Laporan Keuangan Hijau.....	7
F. Asumsi Dasar Akrua.....	8
BAB 2 KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN	9
A. Karakteristik Umum.....	9
B. Karakteristik Kualitatif	10
BAB 3 KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	15
A. Periode Akuntansi.....	15
B. Kelangsungan Usaha	15
C. Mata Uang Pelaporan.....	16
D. Frekuensi Pelaporan	16
E. Laporan Keuangan	17
BAB 4 AKUN-AKUN HIJAU/LINGKUNGAN	31
A. Pendahuluan	31
B. Akun Hijau BUMDES.....	31
C. Sistematisasi Pengkodean Akun.....	32
D. Akun Laporan Keuangan BUMDES.....	33
BAB 5 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	49
A. Tujuan Laporan Keuangan.....	49
B. Komponen Laporan Keuangan.....	50
C. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.....	51
D. Format Laporan Laba/Rugi BUMDES	51
E. Format Laporan Posisi Keuangan/Neraca	54
F. Format Laporan Arus Kas.....	57

G.	Format Laporan Perubahan Modal.....	62
H.	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).....	65
DAFTAR PUSTAKA.....		66
GLOSARIUM		67
INDEKS		73
BIOGRAFI PENULIS.....		74

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Implementasi IFRS S1 dan S2

Seiring dengan mulai diimplementasikannya IFRS S1 - pengungkapan laporan keuangan keberlanjutan dan S2 - pengungkapan laporan iklim di dunia maka perspektif baru terkait akuntansi lingkungan/ hijau mulai mengemuka. Hal tersebut membutuhkan konvergensi yang bertahap di Indonesia, baik di entitas privat maupun publik.

Tahapan saat ini di entitas private masih dalam tahap sukarela dalam pengungkapan IFRS S1 dan S2. Adapun di entitas publik pendekatan keuangan dan akuntansi hijau mulai dikenal bertahap. Dalam peraturan pemerintah (PP) No.71 tahun 2010 terkait standar akuntansi pemerintah (SAP), dasar yang digunakan dalam pelaporan masih tergolong konvensional.

IFRS S1 (Pengungkapan laporan keuangan keberlanjutan) memberikan panduan bagi entitas dalam menyajikan informasi keberlanjutan yang memiliki relevansi terhadap posisi keuangan serta kinerja jangka panjang organisasi. Standar ini mendorong setiap entitas untuk menjelaskan keterkaitan antara aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek tata kelola (ESG) dengan nilai dan prospek usaha mereka di masa depan.

Sedangkan IFRS S2 (Pengungkapan Terkait Iklim) berfokus pada penyajian informasi mengenai risiko dan peluang yang timbul akibat

perubahan iklim. Standar ini mengacu pada kerangka kerja pengungkapan keuangan terkait iklim dan berfokus pada empat komponen pengungkapan yaitu matrik target iklim, tata kelola iklim, strategi iklim dan manajemen risiko yang digunakan oleh entitas dalam menghadapi isu perubahan iklim.

Penerapan kedua standar tersebut membuat organisasi tidak lagi terbatas pada penyajian laporan keuangan tradisional, melainkan juga menampilkan informasi menyeluruh mengenai aspek keberlanjutan kegiatan usahanya. Dengan demikian, para pemangku kepentingan—baik masyarakat, pemerintah, maupun investor—dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai kontribusi entitas terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun penerapan IFRS umumnya dilakukan oleh perusahaan berskala besar dan lembaga keuangan, nilai-nilai dan prinsip dasarnya tetap relevan bagi badan usaha milik desa (BUMDES). Sebagai penggerak utama ekonomi lokal, BUMDES memiliki peran penting dalam mengelola potensi desa secara mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntansi hijau dan pelaporan keberlanjutan yang sejalan dengan IFRS S1 dan S2 dapat memberikan sejumlah manfaat strategis bagi BUMDES.

Manfaat pertama yaitu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, melalui pengungkapan dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan dan aspek sosial masyarakat. Kedua, Menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, yang sejalan dengan sasaran *Sustainable Development Goals* (SDGs). Ketiga, membangun kepercayaan masyarakat desa dan mitra usaha, karena BUMDES dinilai memiliki sistem tata kelola yang lebih bertanggung jawab. Keempat, membuka peluang akses terhadap pembiayaan hijau, baik dari lembaga keuangan maupun program pemerintah.

Dengan demikian, meskipun IFRS S1 dan S2 belum menjadi standar wajib bagi BUMDES, penerapannya tetap dapat dilakukan secara fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi lokal. Bentuk penerapan sederhana dapat dilakukan melalui pelaporan kegiatan yang mendukung keberlanjutan, seperti inisiatif ramah lingkungan, pengelolaan limbah desa, program pemberdayaan masyarakat, atau penerapan konsep ekonomi sirkular dalam kegiatan usaha.

Entitas publik skala desa seperti badan usaha milik desa, pelaporan keuangannya merujuk pada Keputusan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI No. 136 tahun 2022. Panduan keuangan yang dikeluarkan pemerintah merupakan upaya konsistensi pelaporan yang bersifat nasional. Namun, standar yang ada belum mengangkat perspektif lingkungan ataupun hijau dalam laporan keuangannya.

B. Kelemahan Akuntansi Konvensional

Sektor publik merupakan sektor yang menyerap anggaran dalam rangka menjalankan pemerintahan. Sektor publik ini tidak terbatas pada pemerintah pusat maupun daerah melainkan semua bidang usaha pemerintah digolongkan sebagai sektor publik seperti BUMN atau BUMD. Keuangan sektor publik tunduk dan patuh terhadap regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal perspektif akuntansi lingkungan sektor publik boleh mengadopsi pendekatan baru tersebut dengan tetap menggunakan peraturan yang berlaku.

Peraturan yang ada menekankan pada akuntansi sektor publik dengan menggunakan perspektif konvensional. Akuntansi konvensional adalah akuntansi yang melakukan pengakuan, pengukuran dan pelaporan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan, lingkungan maupun sosial

Akuntansi konvensional saat ini disoroti karena dianggap mendukung praktik-praktik kapitalisme. Tentu jika ini dibiarkan maka kepercayaan publik terhadap laporan keuangan sektor publik akan menurun. Selain tanggapan yang negatif terhadap akuntansi konvensional, di bawah ini diuraikan kelemahan dari akuntansi konvensional yang saat ini digunakan oleh banyak sektor:

1. Pertanggung jawaban terhadap lingkungan dan sosial dipandang oleh akuntansi konvensional sebagai beban periodik. Dampaknya semua pengorbanan sumber daya ekonomi untuk TJSL akan mengurangi aset, laba dan nilai ekuitas, sehingga entitas enggan untuk melaksanakan TJSL.

2. Akuntansi konvensional merespons perubahan yang ada terkait lingkungan dengan pengakuan, pengukuran dan pelaporan yang konservatif.
3. Akuntansi konvensional fokus pada kebutuhan informasi dari pihak yang terlibat dalam pengambilan Keputusan.
4. Akuntansi konvensional hanya menyajikan informasi yang materialitas
5. Akuntansi konvensional mengabaikan transaksi yang tidak berdampak langsung pada korporasi.
6. Proses dalam akuntansi konvensional hanya fokus pada komponen yang dapat dikontrol.

C. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Hijau BUMDES

Dasar rujukan dalam penyusunan Laporan keuangan hijau BUMDES adalah Keputusan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi **RI No. 136 tahun 2022** yang dimodifikasi dan dielaborasi dengan memasukkan akun-akun lingkungan/hijau dalam praktiknya. Adapun dasar penerapan akuntansi hijau masih bersifat sukarela, menunggu implementasi IFRS S1 dan S2 di Indonesia.

Dalam proses konvergensi IFRS S1 dan S2, standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang diatur dalam PP N0.71 tahun 2010 bisa dijadikan rujukan tambahan untuk item-item yang tidak diatur dalam Kepmendes No. 136 tahun 2022.

Kepmendes Nomor 136 Tahun 2022 merupakan panduan resmi yang dirilis sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan bagi badan usaha milik desa (BUMDES). Kebijakan ini dimaksudkan untuk membangun tata kelola keuangan BUMDes yang lebih tertib, transparan, akuntabel, serta profesional, sejalan dengan peran BUMDES sebagai badan hukum yang mengelola potensi ekonomi desa.

Keputusan tersebut menggaris bawahi bahwa laporan keuangan BUMDES perlu dilaporkan dengan mengacu pada prinsip akuntansi berlaku umum. Tujuannya supaya laporan keuangan mampu menyajikan informasi yang wajar mengenai posisi keuangan dan kinerja BUMDES, serta dapat dipahami dan dibandingkan antarperiode.

Keputusan Menteri Desa tersebut juga mengatur struktur serta format standar LK yang wajib disusun oleh BUMDes, yang terdiri atas

neraca/laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan (CALK). Setiap laporan memiliki fungsi tersendiri neraca menampilkan posisi aset (lancar, tetap, tidak berwujud dan sumber daya alam), kewajiban, dan ekuitas; laporan laba rugi menunjukkan hasil usaha selama satu periode; laporan perubahan ekuitas menggambarkan pergerakan modal dan laba ditahan; laporan arus kas memperlihatkan aliran kas dari aktivitas operasi rutin, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan; sedangkan catatan atas laporan keuangan memberikan rincian dan penjelasan ekstra atas setiap pos laporan.

Selain itu, Kepmendesa 136/2022 juga memperkenalkan penggunaan bagan akun atau kode akun standar, yang bertujuan menyeragamkan pencatatan transaksi keuangan di seluruh BUMDES agar lebih mudah ditelusuri, diaudit, dan dibandingkan. Pedoman ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi keuangan kepada pemerintah desa dan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab publik atas pengelolaan dana desa dan modal masyarakat.

Secara keseluruhan, kebijakan ini memperkuat eksistensi BUMDES sebagai entitas ekonomi yang kredibel dan berdaya saing. Dengan penerapan sistem pelaporan keuangan yang baku dan sistematis, BUMDes dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta menjadi landasan dalam pengambilan keputusan usaha yang lebih efektif. Penerapan Kepmendesa ini diharapkan mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang berkelanjutan, serta memperkuat kontribusi BUMDES dalam membangun ekonomi desa yang inklusif, transparan, dan berwawasan lingkungan.

D. Pengguna Laporan Keuangan BUMDES

Informasi keuangan yang lengkap dibutuhkan oleh pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap BUMDes sebagai alat analisis untuk menentukan jumlah bagi hasil laba, pengembalian modal dan pengembalian utang. Pihak-pihak pengguna yang membutuhkan informasi keuangan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengguna internal

a. Manajemen

Manajemen merupakan pengguna laporan keuangan yang bertujuan untuk menyiapkan strategi dan kinerja keuangan yang sudah ditetapkan. Kinerja keuangan akan tercermin dalam laporan keuangan yang diungkapkan.

b. Pemimpin Desa

BUMDES merupakan badan usaha yang mana pemilik saham utamanya adalah desa, sehingga pemimpin desa bisa dikategorikan sebagai pengguna laporan keuangan BUMDES.

c. Karyawan

Karyawan memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait kinerja keuangan BUMDES, untuk memastikan jaminan keberlangsungan usahanya.

2. Pengguna eksternal

a. Pemilik modal

Pemilik modal di sini adalah pemodal dari pihak luar yang diberikan kesempatan untuk ikut menanamkan modal di bidang usaha BUMDES dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Biasanya komposisi modal yang ditanamkan pihak eksternal berjumlah 40:60 artinya 40% bisa dikumpulkan dari eksternal dan 60% dari dana desa.

b. Pengawas dan Pemeriksa internal dan eksternal pemerintah

Pengawas di sini adalah badan pengawasan dan pembangunan (BPKP) atau badan pemeriksa keuangan (BPK) menjadi pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai alat pengawasan atas kegiatan usaha yang menggunakan dana desa.

c. Kementerian Desa

Kementerian desa merupakan pengguna laporan keuangan BUMDES secara tidak langsung yang digunakan sebagai pengawasan penggunaan dan alokasi dana desa.

d. Pelanggan

Pelanggan merupakan pihak yang bisa digolongkan sebagai pengguna eksternal laporan keuangan. Pelanggan perlu memastikan ketersediaan produk maupun jasa yang ditawarkan

BUMDES sehingga secara tidak langsung membutuhkan informasi keuangan.

e. Masyarakat

Masyarakat umum tergolong sebagai pengguna laporan keuangan secara tidak langsung untuk memastikan bahwa pajak yang mereka bayar sudah dialokasikan pada usaha-usaha yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

E. Tujuan Laporan Keuangan Hijau

Pada umumnya tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi terkait kinerja keuangan, proyeksi masa depan dan komparasi masa lalu entitas agar meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Terdapat beberapa tujuan spesifik dari laporan keuangan diantaranya:

1. Kepatuhan terhadap pengakuan, pengukuran dan pelaporan keuangan
2. Menyediakan informasi keuangan yang luas kepada pengguna laporan keuangan
3. Memberikan informasi untuk laporan keuangan komparatif
4. Memberikan informasi terkait bagi hasil usaha dengan pihak-pihak yang menanamkan modal.

Tujuan lainnya untuk penyusunan laporan keuangan hijau BUMDES adalah pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi keuangan yang melibatkan kegiatan usaha berwawasan lingkungan yang ditujukan bagi pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan hijau yang disusun BUMDES diperkenankan secara sukarela, artinya BUMDES boleh memilih untuk melaporkannya atau tidak melaporkannya. BUMDES diperkenankan secara sukarela menyampaikan laporannya dengan memasukkan perspektif lingkungannya sebagai upaya bersama mencapai SDGs desa. Tujuan pelaporan keuangan hijau BUMDES digunakan sebagai acuan untuk:

1. Pengelola BUMDES dalam melakukan pelaporan keuangan yang memasukkan aspek lingkungan dari setiap kegiatan usaha yang dijalankannya.
2. Auditor internal Pemerintah (BPKP maupun BPK)

3. Auditor eksternal jika dibutuhkan
4. Pengguna laporan keuangan lainnya

F. Asumsi Dasar Akrual

Dasar akuntansi berdasarkan PP NO. 71 tahun 2010 tidak lagi menggunakan dasar cash (*cash basic*) melainkan sudah sepenuhnya menggunakan dasar akrual. Maka dari itu BUMDES diarahkan menggunakan dasar akrual untuk mencapai tujuannya. Dasar akrual mengakui suatu peristiwa/transaksi pada saat terjadinya transaksi di periode bersangkutan, bukan pada saat uang kas diterima/dikeluarkan. Sehingga pengakuan pendapatan dan beban bisa langsung dilakukan walaupun uang kas/ aset belum diterima.

Dasar akrual menganut prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban yang sesuai dengan IFRS. Penggunaan basis akrual memungkinkan penyajian informasi yang lebih tepat mengenai keadaan keuangan dan kinerja suatu entitas karena semua transaksi ekonomi dicatat pada saat terjadinya, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan. Berbeda dengan basis kas yang hanya mencatat transaksi berdasarkan pergerakan uang, basis akrual memberikan informasi yang lebih lengkap dan mampu menggambarkan posisi keuangan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, metode ini cocok digunakan oleh perusahaan, instansi pemerintah, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mutu laporan keuangan.

BAB 2

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

A. Karakteristik Umum

Komponen laporan keuangan hijau BUMDES mengikuti PABU yang ada di akuntansi sektor publik yaitu terdiri dari lima laporan. Perbedaan utama pencatatan menggunakan akuntansi publik konvensional dengan akuntansi hijau yaitu terdapat penambahan pengakuan, pengukuran dan pelaporan akun-akun lingkungan. Adapun laporan keuangan yang harus disajikan oleh BUMDES terkait akuntansi hijau diantaranya:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
2. Laporan Laba/Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Karakteristik umum dari laporan keuangan adalah bahwa seluruh laporan yang disajikan memuat informasi wajar bebas dari kesalahan materialitas. Wajar berarti pengakuan, pengukuran dan pelaporan tiap transaksi atau peristiwa dicatat jujur sesuai dengan estimasinya. Penyajian wajar merupakan karakteristik umum yang terkandung pada laporan keuangan. Dari lima laporan yang perlu diungkapkan, semua harus mengandung penyajian yang wajar agar informasi yang ingin disampaikan kepada pemangku kepentingan bisa terwakili oleh laporan keuangan.

BAB 3

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Periode Akuntansi

Periode akuntansi laporan keuangan BUMDES dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember dalam tahun yang bersangkutan. Periode akuntansi hijau BUMDES mengikuti periode akuntansi sektor publik, karena ritme pelaporan dilakukan di akhir sampai dengan awal tahun. Apabila pelaporan dilakukan melebihi 31 Desember di tahun bersangkutan maka penetapan waktu pelaporan tidak melebihi 12 bulan.

Pelaporan dilakukan sesuai dengan periode akuntansi pada umumnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada kesalahan material yang timbul akibat terlalu panjangnya proses pengukuran transaksi keuangan. Selain periode akuntansi tahunan, BUMDES diperkenankan secara sukarela untuk melaporkan keuangannya dalam semesteran, triwulan maupun bulanan sesuai siklus laporan keuangan interim.

B. Kelangsungan Usaha

BUMDES menyusun laporan keuangan dengan berdasarkan asumsi bahwa kegiatan usahanya akan terus berlanjut. Kelangsungan usaha atau berkelanjutan seringkali diidentikkan bahwa usaha tersebut bisa berjalan terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. BUMdes tidak berniat untuk melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya.

BAB 4

AKUN-AKUN

HIJAU/LINGKUNGAN

A. Pendahuluan

Akun- akun lingkungan adalah daftar nama/akun atas transaksi, peristiwa dan kejadian yang berkaitan dengan kegiatan pelestarian, pemanfaatan, penanggulangan/mitigasi, perbaikan lingkungan dalam dan luar perusahaan yang menimbulkan arus masuk kas atau keluar kas. Akun- akun lingkungan dimunculkan hanya dalam tiga laporan keuangan terdiri atas laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, serta catatan atas laporan keuangan.

Akun-akun lingkungan memuat berbagai macam aktivitas yang melibatkan langsung kas maupun non kas. Pengakuan akun-akun lingkungan sangat tergantung pada aktivitas yang timbul dari semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDES. Pengakuan perlu teliti agar tidak menimbulkan salah saji material. Pada bab 3 sebelumnya sudah dibahas bagaimana pengakuan, pengukuran dan pelaporan aktivitas lingkungan.

B. Akun Hijau BUMDES

Akun-akun hijau atau lingkungan adalah akun yang spesifik membedakan antara akuntansi konvensional dan akuntansi hijau. Akun

BAB 5

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

A. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan regulasi dan standar yang berlaku secara umum. Adapun tujuan laporan keuangan adalah pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan kepada para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan secara ekonomi, lingkungan dan sosial. Tidak seperti laporan keuangan pada akuntansi konvensional yang hanya memiliki tujuan ekonomi, pada akuntansi hijau tujuan para pemangku kepentingan juga mempertimbangkan masalah lingkungan dan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan hijau menyajikan informasi mengenai kondisi dan kinerja BUMDES, yang mencakup:

1. Aset;
2. Liabilitas;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan;
5. Biaya dan beban.

Informasi terkait hal tersebut jika dilengkapi catatan atas laporan keuangan akan membantu para pemangku kepentingan dalam memprediksi arus kas masa depan dan kepastian diperolehnya keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baker, Richard E., dkk. (2016). Akuntansi Keuangan Lanjutan. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Private. Jakarta:IAI.
- Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 136 tahun. (2022). Jakarta. Kementrian Desa RI.
- Kieso, Donald E, Jerry J. Weygant, and Terry D. Warfield, 2014. Intermediate Accounting Volume 2 IFRS Edition. United States Of America: John Wiley & Sons, Inc.
- Lako, A. (2018). Akuntansi Hijau: Isu, Teori, dan Aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Lisnawati, Lisna, and Magda Siahaan. 2025. "Can Green and Blue Thematic Financing Enhance Sustainability Value? Evidence from Southeast Asia." *International Journal of Ethics and Systems*. doi:10.1108/IJOES-11-2024-0374.
- Lisnawati, Lisna, Titik Aryati, and Juniati Gunawan. 2024. "Implementation of Digital Innovation on Sustainability Performance: The Moderating Role of *Green accounting* in the Industrial Sector." *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies* 1(13(127)): 59–68. doi:10.15587/1729-4061.2024.298639.
- PP No 71 tahun 2010.. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan Jakarta: Salemba Empat.
- Scroot, William. (2003). Financial Accounting Theory. USA. Prantice Hall.

GLOSARIUM

A

Agunan = Jaminan berupa aset yang diberikan untuk memperoleh pinjaman.

Akuntabilitas = Tanggung jawab dalam mempertanggungjawabkan hasil kegiatan kepada pihak terkait.

Arus Kas = Aliran masuk dan keluar uang tunai dalam periode tertentu.

Asset (Aset) = Sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas dan memberikan manfaat di masa depan.

Aset Tak Berwujud = Aset non-fisik seperti hak cipta, merek dagang, atau paten.

Audit = Proses pemeriksaan laporan keuangan untuk memastikan keandalan dan kepatuhannya terhadap standar akuntansi.

B

Bea Impor = Pajak yang dikenakan atas barang yang masuk ke dalam suatu negara.

BUMDes = Badan Usaha Milik Desa; entitas ekonomi desa yang mengelola potensi lokal secara mandiri.

C

Capital Expenditure = Pengeluaran untuk memperoleh atau memperbaiki aset tetap yang memberi manfaat jangka panjang.

Cash Equivalents (Equivalent Cash) = Investasi jangka pendek yang mudah dicairkan menjadi kas.

Defisit = Kondisi ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan.

Dividen = Bagian laba yang dibagikan kepada pemilik modal atau penyerta saham.

Diskon = Potongan harga atau pengurangan nilai pembayaran.

D

Defisit = Kekurangan dana ketika total pengeluaran melebihi pendapatan.

Digit = Angka atau simbol numerik dalam sistem pencatatan keuangan.

E

Efek = Instrumen keuangan seperti saham atau obligasi yang dapat diperdagangkan.

Ekuitas = Hak kepemilikan atas aset setelah dikurangi kewajiban.

Elaborasi = Pengembangan atau penjelasan secara lebih rinci terhadap suatu konsep atau data.

Entitas = Unit ekonomi yang memiliki identitas dan aktivitas keuangan sendiri, seperti BUMDes atau perusahaan.

Environmental = Aspek lingkungan dalam konsep ESG, meliputi pengelolaan dampak ekologis dan sumber daya alam.

Estimasi = Perkiraan nilai suatu pos dalam laporan keuangan berdasarkan data terbaik yang tersedia.

Eksistensi = Keberadaan atau keberlanjutan suatu entitas dalam menjalankan aktivitasnya.

Eksplisit = Pernyataan yang dinyatakan secara jelas dan langsung.

Equivalen Cash = Lihat Cash Equivalents.

ESG (Environmental, Social, Governance) = Kerangka yang menilai kinerja keberlanjutan perusahaan berdasarkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

F

Fleksibel = Bersifat mudah menyesuaikan dengan kondisi atau situasi yang berubah.

G

Governance = Tata kelola organisasi yang mencakup sistem, aturan, dan proses pengambilan keputusan.

Green Bond = Obligasi yang diterbitkan untuk membiayai proyek ramah lingkungan.

Green Sukuk = Instrumen pembiayaan berbasis syariah untuk mendukung proyek berkelanjutan dan ramah lingkungan.

I

Implementasi = Pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, program, atau standar.

Inklusif = Bersifat terbuka dan melibatkan seluruh kelompok masyarakat.

Insentif = Imbalan atau dorongan finansial untuk meningkatkan kinerja atau partisipasi.

Investasi = Penanaman modal untuk memperoleh keuntungan di masa depan.

K

Kapitalisasi = Proses menjadikan biaya tertentu sebagai aset, bukan sebagai beban langsung.

Kapitalisme = Sistem ekonomi yang berfokus pada kepemilikan pribadi dan keuntungan pasar.

Komersil = Kegiatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi.

Komparatif = Dapat dibandingkan antara satu periode atau entitas dengan lainnya.

Komponen = Unsur atau bagian yang membentuk suatu sistem atau laporan keuangan.

Konfirmasi = Pembuktian atau penegasan atas suatu informasi.

Konsistensi = Penerapan prinsip dan metode akuntansi yang sama dari waktu ke waktu.

Konservasi = Upaya pelestarian dan perlindungan sumber daya alam.

Konstruksi = Pembangunan atau perakitan struktur fisik seperti gedung atau infrastruktur.

Kontijensi = Keadaan atau peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan dan berdampak pada posisi keuangan.

Konvergensi = Penyeragaman atau penyelarasan standar akuntansi internasional dan nasional.

Korpo-rasi = Organisasi bisnis berbadan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemiliknya.

L

Laba = Selisih lebih antara pendapatan dan biaya dalam suatu periode akuntansi.

M

Materialitas = Tingkat pentingnya suatu informasi keuangan yang dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan.

Modifikasi = Perubahan atau penyesuaian terhadap metode atau sistem tertentu.

Mutasi = Perpindahan atau perubahan posisi saldo dalam akun-akun keuangan.

N

Neraca = Laporan posisi keuangan yang menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu.

Netralitas = Prinsip penyajian laporan keuangan yang bebas dari bias atau kepentingan pihak tertentu.

P

PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum) = Standar umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Perspektif = Sudut pandang atau cara memandang suatu masalah atau konsep.

Prediktif = Mampu memberikan gambaran atau perkiraan kondisi masa depan.

Private = Bersifat milik pribadi atau non-pemerintah.

Professional = Bersikap sesuai standar etika dan kompetensi dalam menjalankan pekerjaan.

R

Realisasi = Terwujudnya suatu transaksi atau pendapatan dalam bentuk kas atau aset lain.

Regulasi = Aturan yang ditetapkan oleh otoritas untuk mengatur suatu kegiatan.

Regulator = Lembaga atau pihak yang berwenang menetapkan dan mengawasi pelaksanaan regulasi.

Reboisasi = Penanaman kembali hutan yang gundul untuk memperbaiki ekosistem.

Relevan = Memiliki keterkaitan langsung dan berguna bagi pengambilan keputusan.

Renovasi = Perbaikan atau pembaruan terhadap bangunan atau fasilitas.

Restriksi = Pembatasan atau larangan terhadap aktivitas tertentu.

Residu = Sisa nilai suatu aset setelah masa manfaatnya berakhir.

Restorasi = Pemulihan kondisi suatu objek atau lingkungan ke keadaan semula.

Revenue Expenditure = Pengeluaran rutin untuk operasional yang tidak menambah nilai aset.

Revaluasi = Penilaian kembali nilai aset agar mencerminkan harga pasar terkini.

Reliable = Dapat dipercaya karena didukung bukti yang memadai.

Relative = Bersifat perbandingan atau bergantung pada konteks.

S

SAK EMKM = Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.

SAK ETAP = Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Saldo = Jumlah akhir dalam suatu akun setelah memperhitungkan transaksi debit dan kredit.

Saham = Bukti kepemilikan seseorang terhadap modal suatu perusahaan atau entitas.

Social = Aspek sosial dalam ESG yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja.

Sustainable Development Goals (SDGs) = Tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan PBB untuk kesejahteraan global.

Surplus = Kelebihan pendapatan dibandingkan pengeluaran dalam suatu periode.

T

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) = Kerangka pelaporan yang mengarahkan perusahaan untuk mengungkapkan risiko dan peluang terkait perubahan iklim.

Transaksi = Kegiatan ekonomi yang memengaruhi posisi keuangan entitas.

Transmigrasi = Pemindahan penduduk ke daerah baru untuk pemerataan pembangunan.

Transparansi = Keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada publik.

INDEKS

A

Abraham Maslow 35 Adaptasi karakteristik 29 Adversity intelligence 6
Adversity quotient 11, 17, 61,
66, 73, 74
Affective commitment 57
Aktualisasi diri 36
Akuntan 36
Altruism 13
Amerika Serikat 23
Availability of alternative jobs
56

B

Bakat 64
Bakat seni 29
Bali 12
Bank 10
Basic tendencies 29 Budaya perusahaan 4

C

Civic virtue 13
CO2RE 66
Conscientiousness 13
Continuance commitment 57

D

Digital Generation 23

E

Edwin Locke 39
Emotional Quotient (EQ) 17
Endurance 67
Eropa 24
Etika kerja 26

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Lisna Lisnawati, S.E., M. Ak.

Penulis merupakan dosen yang bergelar Doktor Akuntansi dengan kepakaran Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Lingkungan dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Bidang ilmu akuntansi lingkungan masih terbilang baru dan masih jarang di pelajari di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Inilah yang memotivasi penulis untuk fokus mengembangkan akuntansi lingkungan di berbagai sektor baik private maupun sektor publik. Karya-karya tulisannya lebih banyak dituangkan dalam hasil penelitian yang terbit di berbagai jurnal baik nasional maupun internasional bereputasi. Berbagai kebaruan dalam penelitiannya sudah masuk di jurnal internasional bereputasi baik dalam pengembangan alat ukur akuntansi hijau maupun metodologi penelitian. Kontribusi kepakaran akuntansi hijau di sektor publik terutama pengembangan akuntansi hijau di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) mendapatkan hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2025. Dengan semakin berkembangnya akuntansi hijau, tulisan ini mudah-mudahan mampu membuka perspektif baru terkait pengembangan akuntansi keberlanjutan dan hijau di sektor publik.

Email Penulis: lisna.lisnawati@umbandung.ac.id



Dr. Suparjiman, M.M., CHRA.

Ketertarikan penulis terhadap UMKM dimulai pada tahun 2006 silam dimana saat penulis menjabat sebagai manajer Distribusi dan Pembinaan UMK PT Tlkom di kota Bandung. Pendidikan Penulis dimulai pada pendidikan D3 Manajemen di Tel-U Tahun 1992 dan diselesaikan pada tahun 1995, strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Bandung tahun 1996 dan diselesaikan pada tahun 1998. Pendidikan strata 2 penulis di Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta pada Pasca Sarjana Manajemen pada tahun 1999 dan diselesaikan pada tahun 2001. Sedangkan Pendidikan strata 3 di Universitas Padjadjaran pada tahun 2015 diselesaikan tahun 2019 pada pasca sarjana Doktor Ilmu Manajemen (DIM). Pengalaman praktisi, penulis bergabung bekerja sudah lebih dari 40 tahun di BUMN PT Telkom sejak tanggal 1 April 1985 hingga 1 Agustus 2025. Disamping sebagai praktisi penulis juga aktif sebagai dosen tetap di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Bandung (UMBandung), dan pernah sebagai dosen di Universitas Telkom (Tel_U), Universitas PASUNDAN Bandung, dan PIKSI GHANESA Bandung. Penulis memiliki kepakaran dibidang Manajemen Sumber Daya Manusia. Selain sebagai praktisi dan dosen, penulis juga aktif menulis artikel dan jurnal maupun mengikuti beberapa Organisasi profesional antara lain: ISEI, IAEI, Asosiasi Pemandu Wirausaha Indonesia (APWI) dan lainnya dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: suparjiman@umbandung.ac.id

AKUNTANSI HIJAU BUMDES

Akuntansi hijau merupakan perspektif akuntansi lingkungan yang diperkenalkan oleh akademisi dan praktisi untuk memenuhi tuntutan pemangku kepentingan yang peduli terhadap lingkungan. Dalam akuntansi konvensional, pendekatan lingkungan seringkali tidak menjadi bagian dalam akuntansi, karena dianggap hanya sebagai beban periodik. Konvensional hanya mengarah pada pemenuhan tuntutan stakeholders dari sisi ekonomi. Untuk itu keberadaan akuntansi hijau menjadi salah satu pendekatan yang membawa perubahan pada bidang akuntansi terutama dalam mencapai tujuan ekonomi, lingkungan dan tata Kelola.

Buku Akuntansi hijau BUMDES memberikan solusi dalam upaya menghijaukan akuntansi di sektor publik dengan lingkup yang lebih kecil. Ini merupakan upaya mempersiapkan panduan akuntansi hijau (pengakuan, pengukuran dan pelaporan) ke lingkup yang lebih besar. Ada istilah "Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai saat ini, dan mulai konsisten". Istilah tersebut diterapkan untuk mengembangkan terus akuntansi hijau dalam berbagai sektor.

Buku ini mengembangkan bagaimana mengakui, mengukur dan melaporkan akun-akun akuntansi hijau di BUMDES dengan banyak bidang usaha. Pendekatan investasi lingkungan, aset sumber daya alam, liabilitas kontijensi lingkungan, donasi CSR dan biaya-biaya lingkungan merupakan hal yang dikupas mendalam sebagai ciri khas akun-akun lingkungan dalam akuntansi hijau. Buku ini bisa menjadi referensi BUMDES untuk secara sukarela melaporkan akuntansinya menggunakan pendekatan akuntansi hijau. Selain itu, buku ini berpotensi menjadi satu-satunya referensi nasional untuk pelaporan akuntansi hijau BUMDES.

